

KEBEBASAN PEREKONOMIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM DAN NON-ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM

Sari Lestari Zainal Ridho^{*)}

ABSTRAK

Sebagian besar kajian mengenai hubungan antara kebebasan perekonomian dan pertumbuhan dari Produk Domestik Bruto (PDB) menemukan adanya hubungan yang positif. Menggunakan berbagai data, variabel dan metodologi, tidak semua, walaupun sebagian besar kajian sebelumnya memperoleh hasil yang sesuai dengan hipotesa bahwa ada efek positif yang signifikan dari kebebasan perekonomian terhadap pertumbuhan PDB. Namun, dalam kajian kali ini penulis tertarik untuk membandingkan dampak kebebasan perekonomian pada pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara yang merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara yang bukan anggota OKI. Menggunakan profil analisis, temuan pada kajian kami sesuai dengan kajian-kajian sebelumnya.

Kata kunci : *Kebebasan perekonomian, pertumbuhan ekonomi*

Pendahuluan

Kinerja ekonomi telah menjadi perhatian pemerintah dalam sebuah negara sejak lama, karena hal ini merupakan sesuatu yang penting bagi kesejahteraan suatu negara. Salah satu ukuran dari kesuksesan pemerintah adalah kesuksesan dalam kinerja ekonomi, dimana salah satu indikator dari kesuksesan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negeri. Itulah sebabnya, pemerintah selalu mencoba untuk membuat kebijakan ekonomi yang terbaik dalam kepemimpinan mereka, bahkan mereka mulai kampanye dengan janji untuk meningkatkan kesejahteraan, atau kondisi ekonomi yang terbaik dengan membuat kebijakan ekonomi pemerintah.

Tabel 1 di bawah ini adalah daftar dari beberapa negara-negara dengan peringkat (rangking) efisiensi (kebijakan)

pemerintah masing-masing dan kinerja ekonomi tiap Negara pada tahun 2000. factor-faktor input dari kinerja perekonomian adalah evaluasi makro ekonomi dari perekonomian domestik yang terdiri dari perekonomian dalam negeri, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga. Sementara faktor-faktor input dari efisiensi Pemerintah adalah sejauh mana kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap daya saing yang terdiri dari keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja kelembagaan, kerangka kerja bisnis dan pendidikan.

Dari tabel 1 kita dapat melihat bagaimana efisiensi pemerintah memiliki efek pada kinerja perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efisiensi pemerintah, semakin tinggi kinerja perekonomian, sebaliknya, semakin rendah efisiensi pemerintah, semakin rendah pula kinerja

^{*)} Dosen Tetap Politeknik Negeri Sriwijaya

perekonomian. Lebih jelas lagi hubungan antara pemerintah dan efisiensi kinerja perekonomian dapat dilihat pada Gambar 1.

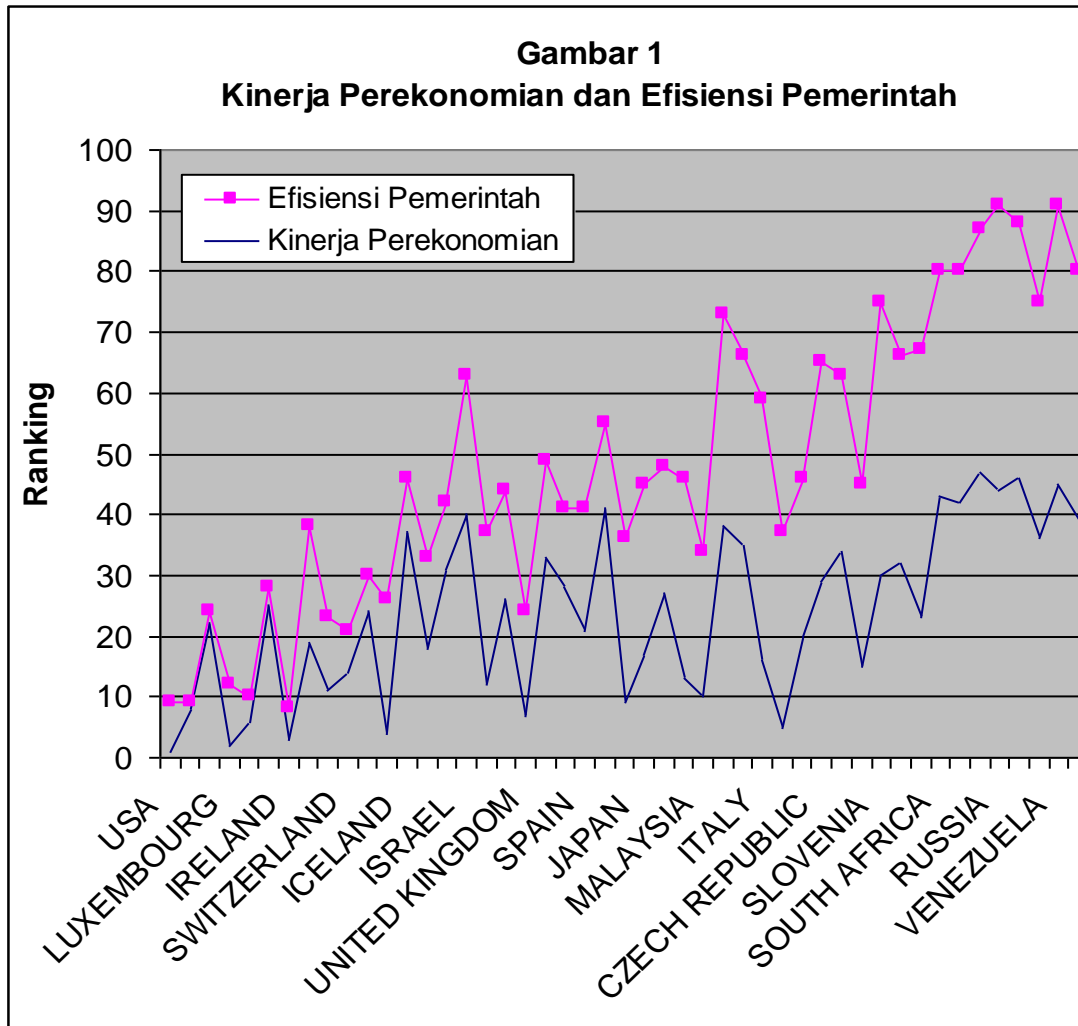
Salah satu kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kondisi ekonomi adalah kebebasan perekonomian. Kebebasan perekonomian didefinisikan sebagai kebebasan tanpa adanya paksaan atau hambatan dari pemerintah dalam bidang produksi, distribusi, atau konsumsi

barang dan jasa di luar batas-batas yang diperlukan bagi masyarakat untuk menjaga dan melindungi kebebasan itu sendiri. Ada banyak kajian yang telah dilaksanakan di bidang kebebasan perekonomian dalam hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian-kajian tersebut menarik perhatian banyak peneliti dikarenakan pentingnya kontribusi kebebasan perekonomian dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah.

Tab e l 1			
No.	Country	Economic Performance	Government Efficiency
1	USA	1	8
2	SINGAPORE	8	1
3	FINDLAND	22	2
4	LUXEMBOURG	2	10
5	NETHERLANDS	6	4
6	CHINA HONGKONG	25	3
7	IRELAND	3	5
8	SWEDEN	19	19
9	CANADA	11	12
10	SWITZERLAND	14	7
11	AUSTRALIA	24	6
12	GERMANY	4	22
13	ICELAND	37	9
14	AUSTRIA	18	15
15	DENMARK	31	11
16	ISRAEL	40	23
17	BELGIUM	12	25
18	TAIWAN	26	18
19	UNITED KINGDOM	7	17
20	NORWAY	33	16
21	NEW ZEALAND	28	13
22	SPAIN	21	20
23	CHILE	41	14
24	FRANCE	9	27
25	JAPAN	17	28
26	HUNGARY	27	21
27	KOREA	13	33
28	MALAYSIA	10	24
29	GREECE	38	35
30	BRAZIL	35	31
31	ITALY	16	43
32	CHINA MAINLAND	5	32
33	PORTUGAL	20	26
34	CZECH REPUBLIC	29	36
35	MEXICO	34	29
36	THAILAND	15	30
37	SLOVENIA	30	45
38	PHILIPPINES	32	34

39	INDIA	23	44
40	SOUTH AFRICA	43	37
41	ARGENTINA	42	38
42	TURKEY	47	40
43	RUSSIA	44	47
44	COLOMBIA	46	42
45	POLAND	36	39
46	VENEZUELA	45	46
47	INDONESIA	39	41

Sumber: *The World Competitiveness Yearbook 2001*, Institute for Management Development, Lausanne, Swiss. IMD International Real World. Real Learning.



Sebuah laporan mengevaluasi hubungan antara kebebasan perekonomian di setiap Negara bagian di Amerika dan di semua provinsi utama Kanada. Dengan menilai ukuran keseluruhan pemerintah, tingkat pajak

dan peraturan pemerintah, para peneliti menemukan bahwa adanya kebebasan perekonomian yang meningkat, secara keseluruhan, di kedua negara sejak awal tahun 1980-an. Secara umum, negara bagian dan provinsi dengan

pajak yang lebih rendah dan pemerintah yang lebih kecil memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama tahun 1980-an dan 1990-an, dan menikmati standar hidup yang lebih tinggi saat ini. Negara bagian dan propinsi yang memperlonggar peraturan pemerintah dan menurunkan pajak memperlihatkan hasil (pertumbuhan ekonomi) yang baik.

Sebagian besar dari kajian mengenai hubungan antara kebebasan perekonomian dan pertumbuhan dari Produk Domestik Bruto (PDB) telah menemukan hubungan yang positif. Menggunakan berbagai data, variabel dan metodologi, sebagian besar kajian sebelumnya sesuai dengan hipotesa yang ada yaitu adanya efek positif yang signifikan dari kebebasan perekonomian terhadap pertumbuhan PDB. Namun, dalam kajian penulis kali ini, bertujuan untuk penulis adalah untuk membandingkan dampak kebebasan pada pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara yang merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara yang bukan anggota OKI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kajian sederhana ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- (a) Apakah ada pengaruh dari kebebasan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI dan non-anggota OKI?
- (b) Jika ada pengaruh atau efek dari kebebasan perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI dan non-anggota OKI, adakah persamaan dan atau perbedaan yang berlaku di kedua kelompok negara?

Tinjauan Pustaka

Sturm dan De Haan (2001), dalam studi mereka menggunakan berbagai indikator bagi kebebasan perekonomian mencoba untuk menjawab seberapa kuat hubungan antara kebebasan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan kebebasan perekonomian secara kuat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini berpendapat bahwa walaupun dampak terkecil dari observasi dimasukan ke dalam perhitungan. Namun dalam hal ini, tingkat kebebasan perekonomian tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Carlsson dan Lundstrom (2002) menginvestigasi tipe khusus seperti apa dari kebebasan perekonomian yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris ini menunjukkan bahwa kebebasan perekonomian tidak berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga menurut mereka hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan dalam kebebasan ekonomi tidak berarti, dalam istilah umum, baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2002, Scully, menginvestigasi peranan kebebasan perekonomian yang dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan dalam meningkatkan pemerataan pendapatan, dan pengaruh tingkat kemajuan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Dalam kajian ini, Scully menemukan bahwa kebebasan perekonomian mendorong baik pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, dan bahwa ada pengaruh yang positif, namun ada pertukaran

relatif kecil antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.

Cole (2003) melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak kebebasan perekonomian pada pertumbuhan ekonomi dalam kerangka teori alternatif, dengan menggunakan alat ukur tertentu yaitu indeks kebebasan perekonomian dunia (*the economic freedom of the world Index/EFW*). Indeks kebebasan perekonomian dunia menekankan pada berbagai variabel kebijakan yang dianggap dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi: tingkat inflasi, pajak, belanja publik, perusahaan pemerintah, investasi langsung pemerintah, proteksi tarif, hambatan non tarif, control harga, dan distorsi dalam pasar tenaga kerja dan kredit. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Cole (2003) adalah kebebasan perekonomian merupakan faktor yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Gordillo dan Arce (2003) telah melakukan suatu penelitian empiris pada pertumbuhan ekonomi dan kebebasan perekonomian. Penelitian yang mereka lakukan menggunakan model yang dinamis untuk menentukan hubungan sebab dan akibat yang diciptakan oleh Granger, mereka mencoba untuk menentukan apakah ada hubungan kausal antara kebebasan ekonomi, kebebasan politik, dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang menjadi hal penting yang muncul dari kajian ini adalah bahwa tidak ada perubahan yang cukup untuk pertumbuhan pembangunan terakhir. Juga ditemukan bahwa tingkat kebebasan yang moderat diperlukan dalam bidang politik dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan.

Advokasi demokrasi dalam hal kebebasan berpolitik yang akan

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan adil. Bertentangan dengan perspektif yang menyatakan bahwa rezim demokratis menghambat pertumbuhan karena fokus pada tujuan jangka pendek. Dalam salah satu tinjauan empiris berhubungan dengan pertumbuhan dan demokrasi, satu hal yang berbeda adalah tidak adanya kepastian mengenai sifat dari hubungan. Comeau Jr (2003), dalam tulisannya "Democracy and Growth: A Relationship revisited", meninjau ulang isu dalam konteks tahun 1970an dan 1980an. Ia memperkenalkan konsep modal awal demokratis, dan bahwa beberapa faktor lainnya, selain jenis rezim politik, yang memberikan kontribusi terhadap pengaruh politik pada pertumbuhan ekonomi. Temuannya menunjukkan bahwa jelas kekuasaan neoclassical model pertumbuhan yang digunakan dalam kajian ini adalah diperkuat dengan penambahan proxy untuk jenis rezim, stabilitas rezim, tingkat awal dari hak politik, modal awal demokratis, tingkat kebebasan ekonomi, ketersediaan sumber daya manusia, dan lokasi negara.

Selama ini, literatur mengenai kebebasan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi telah menggunakan rangkuman ukuran-ukuran kebebasan dalam rangka menentukan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Heckelman dan Stroup (2000) percaya bahwa rangkaian ukuran-ukuran kebebasan menimbulkan masalah-masalah yaitu kekeliruan melakukan spesifikasi. Mereka menggunakan pertumbuhan data Heston-Summers untuk menentukan mana dari kategori disaggregated kebebasan perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan dan

menemukan bahwa hanya sedikit indeks yang secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Namun studi ini mendapatkan kritikan dari para peneliti lainnya. Sturm dkk (2002) menyatakan bahwa prosedur sebagai alternatif agregasi yang diusulkan oleh Heckelman dan Stroup ini memiliki banyak kekurangannya.

Indeks Kebebasan Perekonomian

Indeks kebebasan ekonomi yang dibuat oleh The Heritage Foundation di akhir tahun 1980-an digunakan sebagai alat bagi para pembuat kebijakan dan investor. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah ukuran yang sistematis dan empiris dari kebebasan perekonomian di negara-negara di seluruh dunia. Indeks yang lebih dari

sekedar sebuah dataset berdasarkan riset empiris; adalah sebuah analisis teoritical dari faktor-faktor yang paling mempengaruhi pengaturan kelembagaan pertumbuhan ekonomi.

Indeks Kebebasan Ekonomi Heritage Foundation / Wall Street Journal 2003 mengukur seberapa baik skor(nilai) dari 161 negara pada daftar 50 independen variabel yang dibagi menjadi 10 faktor kebebasan perekonomian. Semakin tinggi skor pada factor-faktor tersebut, semakin besar tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian dan perekonomian kurang menikmati kebebasannya di sebuah negara. 50 variabel ini dikelompokkan ke dalam kategori sebagaimana yang tercantum pada tabel 2.

Tabel 2 Kategori yang tercakup oleh dari Indeks Kebebasan Ekonomi
Kebijakan perdagangan Beban fiskal pemerintah Intervensi pemerintah dalam perekonomian Kebijakan moneter Arus modal dan investasi asing Perbankan dan keuangan Upah dan harga Hak milik Regulasi Black market

Sumber: Gerald P. O'Driscoll, Jr, Edwin J. Feulner, Mary Anastasia O'Grady dengan Ana I. Eiras dan Brett D Schaefer. (2003)

Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan merupakan faktor kunci dalam mengukur kebebasan ekonomi. Tingkat dimana pemerintah yang hinders dari arus perdagangan asing bebas dapat memiliki kaitan langsung pada kemampuan individu untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya.

Kebijakan perdagangan skor diberikan berdasarkan negara dari nilai tarif rata-rata. Variabel kebijakan Perdagangan: nilai tarif rata-rata, hambatan non-tarif, dan korupsi layanan di bea cukai.

Beban fiskal Pemerintah. Untuk mengukur beban fiskal pemerintah yang

diberlakukan pada warga. Para peneliti mengevaluasi tingkat pajak harga dan tingkat pengeluaran pemerintah. Pajak dapat digunakan untuk individu dalam menilai "harga" yang dibayar untuk menyediakan upaya ekonomi atau terlibat dalam sebuah wira usaha. Semakin tinggi harga usaha atau kewirausahaan, semakin sedikit orang yang akan menjalankannya. Tingkat pajak yang lebih tinggi membuat individu-individu tidak termotivasi untuk mengejar tujuan-tujuan mereka di dalam perekonomian. Variabel dari beban fiskal pemerintah adalah: pajak atas pendapatan, tingkat marjinal untuk pembayar pajak rata-rata, pajak perusahaan, dan pengeluaran pemerintah sebagai persen dari PDB.

Intervensi pemerintah dalam perekonomian. Faktor ini mengukur langkah-langkah pemerintah dalam penggunaan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk tujuan kepentingan pemerintah sendiri dan kontrol pemerintah terhadap sumber-sumber daya melalui kepemilikan. Pengukuran ini terdiri dari pengukuran terhadap produksi dan konsumsi pemerintah. Transfer pembayaran, yang terdiri dari pertukaran wajib sumber daya antara individu, dikecualikan dari ukuran ini. Adapun variabel Intervensi pemerintah dalam Ekonomi ini yaitu: konsumsi pemerintah sebagai persentase dari perekonomian, kepemilikan usaha dan industri pemerintah, porsi penerimaan pemerintah dari perusahaan milik negara dan kepemilikan properti pemerintah, output perekonomian yang dihasilkan oleh pemerintah.

Kebijakan moneter. Nilai mata uang suatu negara mayoritas dihasilkan dengan kebijakan moneter. Bila

kebijakan moneter pemerintah memfasilitasi harga pasar, individu akan menikmati kebebasan ekonomi yang lebih besar. Variabel-variabel dari faktor kebijakan moneter: tingkat inflasi weighted everage dari 1992 sampai 2001.

Arus Modal dan Penanaman Modal Asing. Membatasi investasi asing berarti membatasi modal yang masuk ke suatu negara sehingga menghambat kebebasan perekonomian. sebaliknya, sedikit atau tidak ada batasan dari investasi asing meningkatkan kebebasan perekonomian; investasi asing menyediakan dana untuk ekspansi ekonomi. Untuk kategori ini, semakin banyak batasan negara pada investasi asing menyebabkan semakin rendah tingkat kebebasan perekonomian dan semakin tinggi skornya. Variabel-variabel dari faktor aliran (arus) modal dan investasi asing adalah: investasi asing, pembatasan kepemilikan asing dalam bisnis, pembatasan pada industri dan perusahaan-perusahaan yang terbuka bagi investor asing, pembatasan dan persyaratan pada kinerja perusahaan asing, kepemilikan asing atas tanah, perlakuan yang sama di bawah undang-undang untuk kedua perusahaan asing dan domestik, membatasi repatriasi pendapatan dan ketersediaan pembiayaan lokal untuk perusahaan asing.

Perbankan dan Keuangan. Di kebanyakan negara, bank menyediakan jasa yang penting dalam bidang keuangan yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, mereka meminjamkan uang untuk memulai bisnis, membeli rumah dan memperoleh kredit yang aman bagi konsumen untuk membeli barang tahan lama, selain itu

bank juga menyediakan tempat yang aman bagi individu untuk dapat menyimpan penghasilan mereka. Semakin banyak bank yang dikendalikan oleh pemerintah, semakin kurang bebas bagi perbankan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Satu konsekuensi yang harus dihadapi dari peraturan bank yang ketat adalah membatasi kebebasan perekonomian, sehingga semakin banyak pemerintah yang membatasi perbankan, semakin tinggi skornya dengan demikian menunjukkan tingkat kebebasan perekonomian yang semakin rendah. Variabel – variabel dari faktor perbankan dan keuangan adalah: kepemilikan bank-bank oleh pemerintah, pembatasan dalam membuka cabang dan anak perusahaan bank asing, pengaruh pemerintah dalam alokasi kredit, peraturan pemerintah dan kebebasan untuk menawarkan segala jenis jasa keuangan, sekuritas dan asuransi kebijakan.

Upah dan harga. Dalam suatu ekonomi pasar, harga mengalokasikan sumber daya tertinggi yang digunakan. Sebuah perusahaan yang memerlukan karyawan lebih banyak akan memberi sinyal pada pasar dengan menawarkan upah yang lebih tinggi, Harga juga bertindak sebagai sinyal kepada produsen dan konsumen dengan menyampaikan informasi yang akan didapatkan dengan mahal. Misalnya, jika permintaan meningkat, ini akan tercermin dalam harga produk dan akan menjadi sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksi. Variabel dari faktor upah dan harga: undang-undang upah minimum, kebebasan untuk menetapkan harga sendiri tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, pengendalian harga oleh pemerintah dan sejauh mana

pengendalian harga pemerintah digunakan, usaha pemerintah dalam memberikan subsidi harga bagi dunia usaha yang mempengaruhi harga dan peran pemerintah dalam menetapkan upah.

Hak Kekayaan. Kemampuan untuk menumpuk kekayaan pribadi merupakan factor utama yang memotivasi kekuatan utama dalam pasar ekonomi, dan supremasi hukum sangat penting untuk benar-benar menjalankan ekonomi pasar-bebas. Jaminan atas hak kekayaan memberikan rasa percaya diri kepada warga negara untuk melakukan kegiatan komersial, menyimpan pendapatan mereka, dan membuat rencana jangka panjang karena mereka tahu bahwa mereka adalah aman dari perampasan. Faktor ini meneliti sejauh mana pemerintah melindungi hak kepemilikan oleh swasta dengan menegakkan hukum dan seberapa aman hak milik pribadi dari masalah perampasan. Semakin kurang mendapat perlindungan hak milik pribadi, semakin rendah tingkat kebebasan ekonomi dan semakin tinggi skor. Variabel-variabel dari faktor hak kekayaan adalah: Kebebasan dari pengaruh pemerintah dalam sistem peradilan, komersial kontrak, pengesahan dari arbitrase asing dari kontrak sengketa, perampasan hak milik oleh pemerintah, korupsi di peradilan, keterlambatan menerima keputusan peradilan dan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak milik swasta .

Peraturan. Peraturan dan batasan menimbulkan kesulitan bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis baru. Di beberapa negara, pejabat pemerintah memberengut pada inisiatif sektor swasta, dalam beberapa kasus, pejabat

pemerintah bahkan membuat hal tersebut sebagai sesuatu yang ilegal. Banyak peraturan menghambat usaha, dan yang paling penting adalah yang terkait dengan perizinan usaha dan perusahaan baru. Di beberapa negara, serta banyak negara di Amerika Serikat, prosedur untuk mendapatkan izin usaha merupakan hal yang sederhana, sesederhana surat dalam formulir pendaftaran dengan biaya minimal. Variabel-variabel dari faktor peraturan adalah: persyaratan perijinan untuk menjalankan bisnis, kemudahan memperoleh izin usaha, korupsi di birokrasi, peraturan tenaga kerja, serta peraturan tenaga kerja tertentu, lingkungan hidup, konsumen keselamatan dan peraturan kesehatan pekerja dan peraturan yang diterapkan yang menjadi sebuah beban usaha.

Pasar Gelap. Dalam beberapa kasus, keberadaan pasar gelap bisa jadi merupakan sesuatu yang positif, setidaknya ada beberapa kemampuan untuk terlibat dalam kewirausahaan atau untuk mendapatkan barang terbatas dan jasa. Untuk kepentingan indeks ini, semakin besar pula *black market* (pasar gelap) di suatu negara tertentu, maka semakin rendah tingkat kebebasan perekonomian, dan semakin lazim keberadaan kegiatan *black market*, skor

yang diperoleh lebih buruk. Sebaliknya, semakin sedikit pasar gelap, semakin tinggi tingkat kebebasan ekonomi, dan semakin kurang lazim kegiatan ini, semakin besar skornya. Variabel dari faktor pasar gelap: penyelundupan, pembajakan dari properti di *black market*, produksi pertanian yang disediakan di *black market*, manufaktur yang disediakan di *black market*, layanan yang disediakan di pasar gelap, transportasi disediakan pada pasar gelap dan pasar tenaga kerja yang disediakan pada pasar gelap

Indeks kebebasan perekonomian dikelompokkan dalam empat kategori utama. Empat kategori utama dari kebebasan perekonomian dalam indeks adalah:

- 1) Bebas (Free)-negara dengan rata-rata skor keseluruhan (indeks kebebasan perekonomian) sebesar atau kurang dari 1,95;
- 2) Kurang Bebas (Mostly Free)-negara dengan rata-rata dari keseluruhan skor 2,00 ke 2,95;
- 3) Kurang tidak bebas (Mostly Unfree)-negara dengan rata-rata dari keseluruhan skor 3,00 ke 3,95;
- 4) Tidak Bebas (Repressed)-negara dengan rata-rata dari keseluruhan skor 4,00 atau lebih tinggi.

Kategori yang telah ditampilkan dalam tabel 2 sangat berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Gwartney dan Lawson (2001), sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Bidang-bidang utama yang digunakan dalam Indeks Kebebasan Perekonomian
Ukuran Pemerintahan Struktur penggunaan ekonomi pasar Kebijakan moneter dan stabilitas harga Kebebasan untuk menggunakan mata uang pengganti Keamanan dalam hak kepemilikan dan kontrak kelangsungan hidup Kebebasan untuk berdagang dengan pengusaha asing Kebebasan pertukaran di pasar modal dan keuangan
Kategori yang telah ditampilkan dalam tabel 2 sangat berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Gwartney dan Lawson (2001), sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di bawah ini:

Sumber: Gwartney dan Lawson (2001)

Metode Kajian

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah melakukan kajian analitis dan komparatif. Menggunakan profil analisis atau metodr grafik, penulis mencoba untuk membandingkan dampak kebebasan pada pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara yang meupakan anggota Organization of Islamic Conference atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara yang bukan anggota OKI. penulis juga berusaha untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari dampak yang dihasilkan, dengan menggunakan data yang tersedia, yang diperlukan untuk kajian ini.

Studi pustaka akan digunakan dalam kajian ini, termasuk jurnal-jurnal akademik, makalah-makalah dari konferensi-konferensi, majalah, buku referensi dan buku-buku yang terkait,

koran, dan lain-lain. Dengan tujuan mencari sumber dan data relevan yang terbaik, berbagai sumber pengetahuan akan dijelajahi termasuk perpustakaan dan lembaga-lembaga penelitian dan juga dari situs internet.

Sumber data

Menggunakan data dari sejumlah besar negara. Data dari Produk Domestik Bruto(PDB) per kapita dan indeks kebebasan perekonomian pada tahun 2000. Data pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan adalah persentase pertumbuhan ekonomi 1990-2000. Informasi PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari *The World Bank 2002 World Development Indicators*. Data indeks kebebasan perekonomian diperoleh dari *2003 Index of Economic Freedom*. Total jumlah negara yang digunakan dalam kajian ini adalah 130; 89 negara-negara

non-anggota OKI; dan 41 negara anggota OKI; yang merupakan negara-negara dengan data yang diperlukan

tersedia. Data yang digunakan sebagaimana yang tampak dalam tabel 4 dan table 5.

Tabel 4 Data Negara-Negara anggota Organisasi Konferensi Islam				
No.	Ranking	Country	Index	PDB percapita (\$billion)
1	24	United Arab Emirates	2.15	16.02793103
2	40	Kuwait	2.5	18.8915
3	56	Oman	2.8	6.234166667
4	62	Jordan	2.9	1.702040816
5	62	Uganda	3	0.277927928
6	68	Morocco	2.75	1.16184669
7	68	Saudi Arabia	2.95	8.371352657
8	68	Tunisia	3	2.027291667
9	72	Malaysia	2.7	3.848025751
10	72	Mali	2.9	0.212777778
11	80	Senegal	3.05	0.460105263
12	85	Guinea	3.1	0.407027027
13	85	Mauritania	3.8	0.346296296
14	89	Gabon	3.1	4.11
15	94	Algeria	3.45	1.753486842
16	94	Burkina Faso	3.4	0.193982301
17	94	Lebanon	3.2	3.843418661
18	94	Mozambique	3.8	0.212090396
19	99	Gambia, The	3.4	0.324615385
20	99	Indonesia	3.5	0.728398289
21	99	Pakistan	3.4	0.446328747
22	104	Albania	3.7	1.103529412
23	104	Azerbaijan	4.2	0.658375
24	104	Benin	2.9	0.334126984
25	104	Cameroon	3.4	0.59590604
26	104	Egypt	3.5	1.542578125
27	104	Kyrgyz Rep., The	3.6	0.266122449
28	113	Chad	3.8	0.182727273
29	113	Niger	3.8	0.169074074
30	119	Bangladesh	3.75	0.359313501
31	119	Kazakhstan	3.7	1.223489933
32	119	Turkey	2.75	3.061822358
33	128	Togo	3.8	0.270888889
34	131	Yemen	3.85	0.487542857
35	140	Nigeria	3.3	0.323758865
36	140	Sierra Leone	3.8	0.1272
37	142	Guinea Bissau	4.3	0.179166667
38	143	Tajikistan	4	0.15983871
39	146	Iran	4.55	1.646844584
40	146	Turkmenistan	4.3	0.864927924
41	149	Uzbekistan	4.4	0.309112903

Tabel 5
Data Negara-negara bukan anggota Organisasi Konferensi Islam

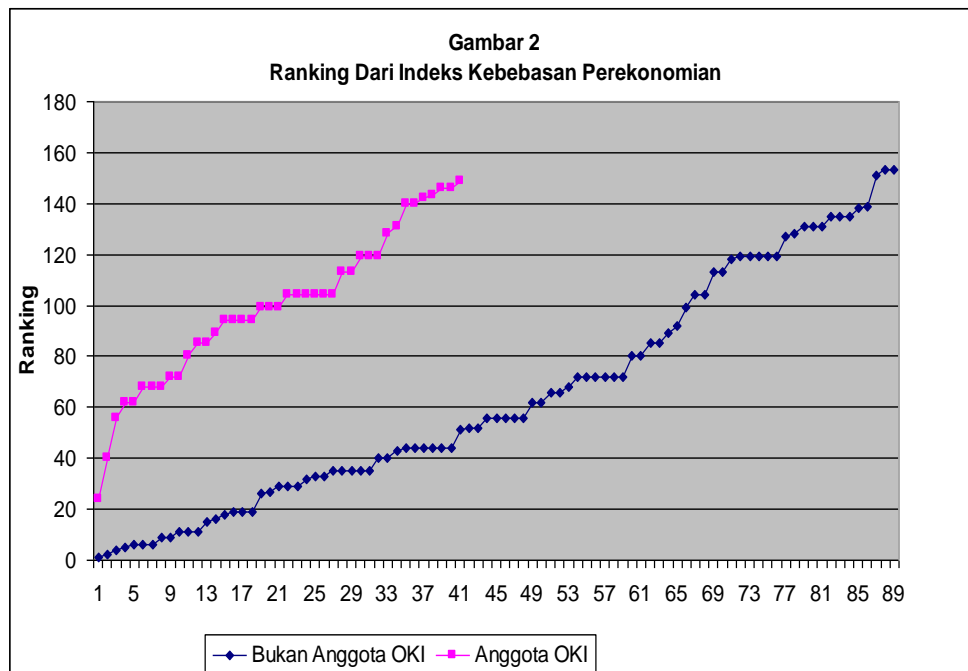
No.	Ranking	Country	Index	PDB percapita (\$billion)
1	1	Hong Kong	1.30	1.103529412
2	2	Singapore	1.45	23.063
3	4	New Zealand	1.70	13.13236842
4	5	Ireland	1.85	24.70131579
5	6	Denmark	2.25	30.63075472
6	6	Estonia	2.20	3.549285714
7	6	United States	1.80	34.93397017
8	9	Australia	1.90	20.31838542
9	9	United Kingdom	1.90	23.69442211
10	11	Finland	2.20	23.35884615
11	11	Netherlands	2.05	22.94125786
12	11	Sweden	2.35	25.54146067
13	15	Switzerland	1.90	33.30055556
14	16	Chile	2.00	4.641118421
15	18	Canada	2.00	22.33383117
16	19	Austria	2.05	23.33691358
17	19	Belgium	2.10	22.00466019
18	19	Germany	2.20	22.78579075
19	26	El Salvador	2.00	2.096984127
20	27	Norway	2.30	35.94866667
21	29	Italy	2.30	18.61282496
22	29	Lithuania	2.90	3.057837838
23	29	Spain	2.40	14.14070886
24	32	Portugal	2.30	10.5054
25	33	Israel	2.75	17.80419355
26	33	Latvia	2.65	2.979166667
27	35	Botswana	2.95	3.303125
28	35	Cambodia	3.00	0.26525
29	35	Czech Rep., The	2.20	4.9298058
30	35	Japan	2.15	38.1527502
31	35	Uruguay	2.55	5.974242424
32	40	France	2.50	21.9736163
33	40	Thailand	2.70	2.01261944
34	43	Trinidad and Tobago	2.35	5.624615385
35	44	Armenia	3.10	0.503684211
36	44	Bolivia	2.65	0.997710843
37	44	Costa Rica	2.85	4.171315789
38	44	Hungary	2.55	4.5633
39	44	Madagascar	3.20	0.250193548
40	44	Panama	2.40	3.41
41	51	South Africa	2.90	2.941285047
42	52	Korea, South	2.40	9.666363636
43	52	Namibia	2.90	1.932777778
44	56	Greece	2.75	10.62698113

45	56	Guatemala	2.70	1.665614035
46	56	Jamaica	2.50	2.847307692
47	56	Mexico	3.00	5.862367347
48	56	Peru	2.45	2.080389105
49	62	Philippines, The	2.85	0.988531746
50	62	Slovenia	3.00	9.0645
51	66	Poland	2.80	4.075943152
52	66	Slovak Rep., The	3.00	3.540925926
53	68	Argentina	2.10	7.701621622
54	72	Brazil	3.50	3.494471831
55	72	Colombia	2.90	1.921583924
56	72	Mauritus	2.85	3.650833333
57	72	Mongolia	3.15	0.40375
58	72	Nicaragua	3.60	0.469803922
59	72	Swaziland	3.00	1.478
60	80	Honduras	3.35	0.926875
61	80	Sri Lanka	2.90	0.840463918
62	85	Dominican Rep., The	2.90	2.341547619
63	85	Kenya	3.05	0.344086379
64	89	Croatia	3.50	4.325227273
65	92	Moldova	3.20	0.299069767
66	99	Paraguay	2.80	1.367454545
67	104	Lesotho	3.55	0.4495
68	104	Tanzania	3.40	0.267863502
69	113	Georgia	3.65	0.6058
70	113	Ghana	3.10	0.268911917
71	118	Ecuador	3.10	1.079920635
72	119	Ethiopia	3.50	0.099393468
73	119	India	3.80	0.449837582
74	119	Nepal	3.60	0.239
75	119	Venezuela	3.30	4.978677686
76	119	Zambia	3.90	0.288217822
77	127	China	3.40	0.855404356
78	128	Haiti	4.00	0.50625
79	131	Malawi	3.65	0.164757282
80	131	Rwanda	4.00	0.211058824
81	131	Ukraine	3.60	0.642242424
82	135	Congo, Republic of	3.90	1.071666667
83	135	Rusia	3.70	1.724629121
84	135	Vietnam	4.30	0.399286624
85	138	Romania	3.30	1.639241071
86	139	Bosnia	4.40	1.0985
87	151	Belarus	4.10	2.995
88	153	Laos	4.60	0.32245283
89	153	Zimbabwe	3.90	0.586666667

Hasil dan Analisa

Dari data yang diberikan tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa dalam Negara-negara anggota OKI, sebagian besar negara ini berada di bawah kategori *unfree* atau tidak bebas, dimana kebebasan-ekonomi negara-negara tersebut dengan indeks kebebasan perekonomian berada diantara 3,00 sampai dengan 3,95, sedangkan Negara-negara yang bukan anggota OKI kebanyakan dari mereka di bawah kategori *Free* atau bebas, dimana kebebasan-ekonomi negara-negara tersebut dengan rata-rata skor keseluruhan (indeks kebebasan perekonomiannya) berada diposisi dari 2,00 sampai 2,95.

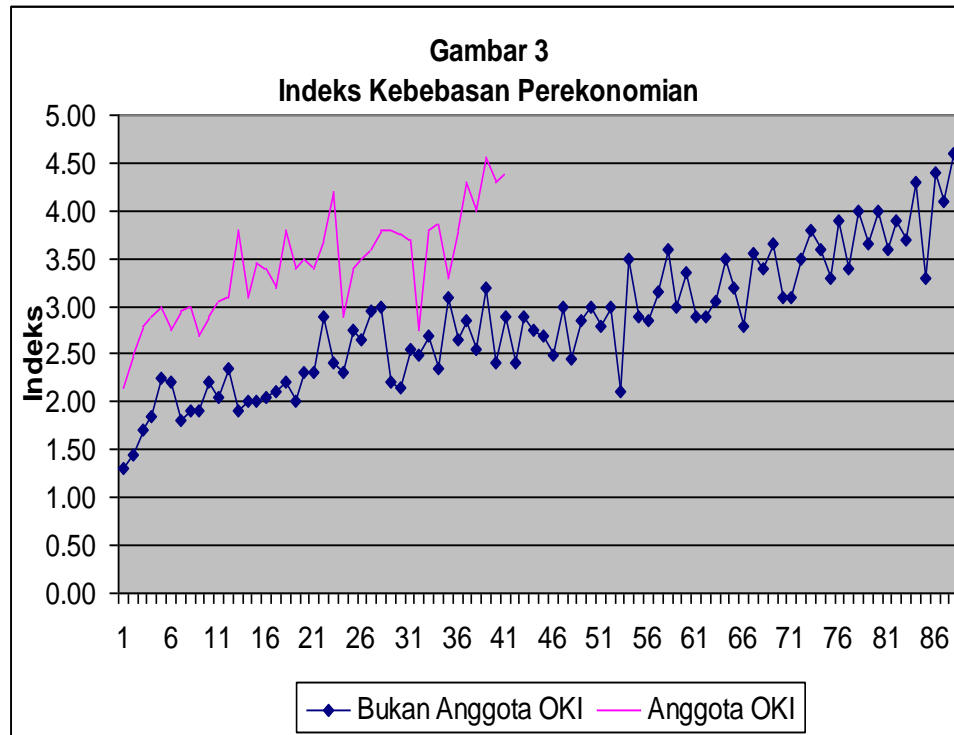
Gambar 2 menunjukkan kepada kita bahwa peringkat indeks kebebasan ekonomi kedua kelompok Negara-negara anggota OKI dan Negara-negara bukan anggota OKI. Hal ini jelas digambarkan bahwa grafik dari non-anggota OKI pada posisi lebih landai; sedangkan grafik Negara Negara yang merupakan anggota OKI lebih curam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagian besar anggota OKI memiliki indeks kebebasan perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara non-anggota OKI yang berarti bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian yang lebih tinggi dan ekonomi yang kurang kebebasannya.



Sumber: diolah dari data pada tabel 4 dan tabel 5

Gambar 3 memberi kita informasi yang memperkuat analisis yang penulis telah sebutkan di atas, bahwa grafik dari indeks kebebasan ekonomi dari kedua kelompok negara menunjukkan kepada

kita bahwa mayoritas Negara-negara non anggota OKI mengalami keadaan kebebasan perekonomian yang lebih bebas (*mostly free*) dibanding Negara-negara anggota OKI

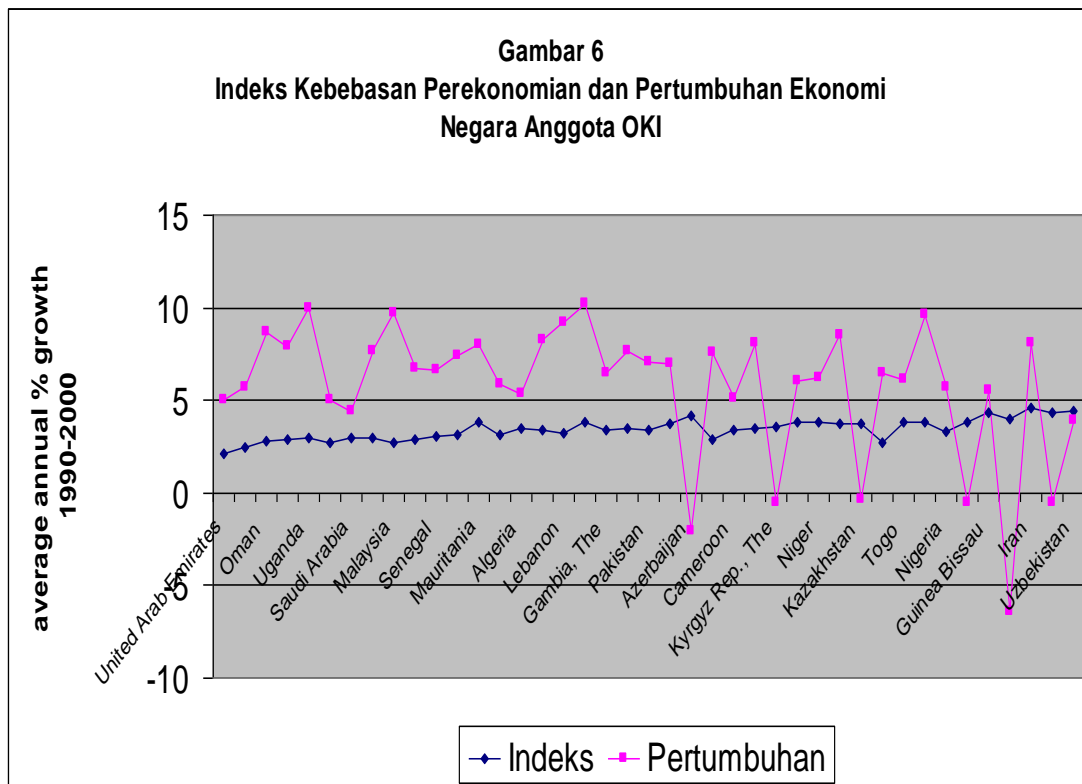


Sumber: Data diolah dari tabel 4 dan tabel 5

Gambar 4 dan dan gambar 5 menjelaskan hubungan antara indeks kebebasan ekonomi tahun 2000 dan PDB per kapita pada tahun yang sama dari masing-masing negara-negara anggota OKI dan negara-negara non-anggota OKI. Angka-angka ini menunjukkan kepada kita bahwa terdapat pola yang berfluktuasi, namun pola grafik indeks kebebasan perekonomian bertentangan dengan jalur dari pola grafik dari PDB per kapita. Ia memberitahu kami bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks kebebasan ekonomi dan PDB per kapita, semakin tinggi indeks kebebasan ekonomi, semakin rendah PDB. Misalnya, dalam kasus negara non-anggota OKI: Amerika dinyatakan memiliki Indeks kebebasan ekonomi sebesar 1,8-yang berarti di bawah kategori negara bebas (Free) dalam kebebasan perekonomiannya, PDB per

kapita pada tahun yang sama adalah sebesar \$ 34,934 miliar. Sementara itu, Rusia dengan indeks kebebasan ekonomi sebesar 3,70- yang berarti berada dalam kategori negara yang kebebasan perekonomiannya *mostly unfree*, memiliki PDB per kapita adalah sebesar \$ 1,725 miliar. Pola ini juga dialami oleh Negara-negara anggota OKI.

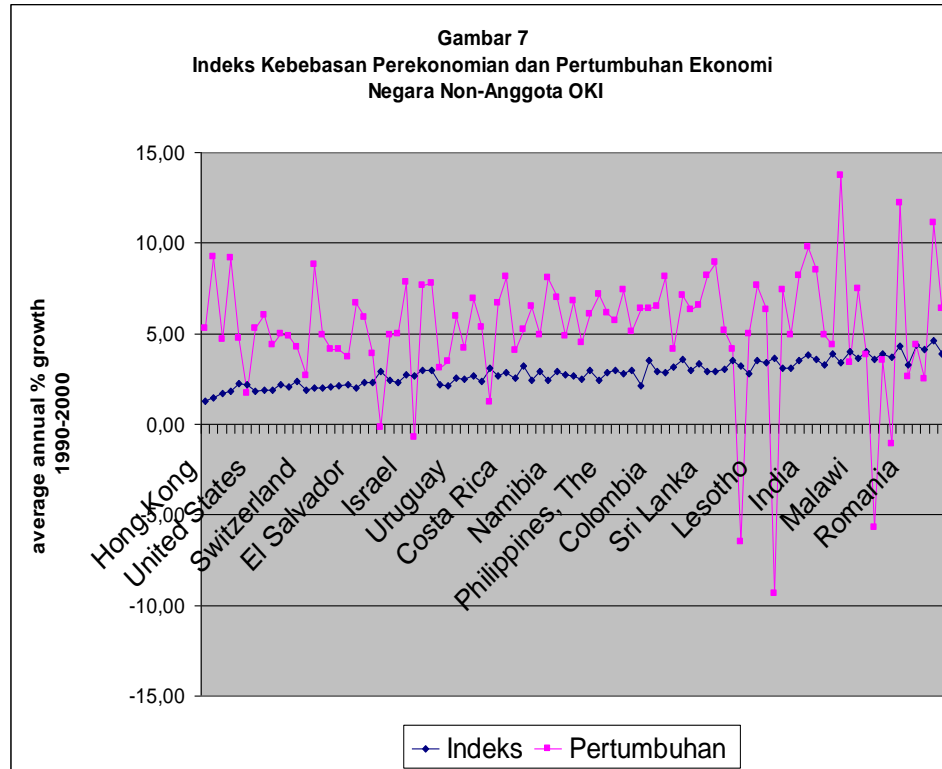
Gambar 6 dan 7, yang merupakan fokus dalam kajian ini, menjelaskan hubungan antara indeks kebebasan perekonomian tahun 2000 dan pertumbuhan PDB per kapita di 1990-2000 dari masing-masing Negara anggota OKI dan Negara non-anggota OKI. Angka-angka ini menunjukkan kepada kita bahwa fluktuasi dalam indeks kebebasan perekonomian adalah bertentangan dengan fluktuasi pada pertumbuhan PDB per kapita.



Sumber: data yang diolah dari tabel 4 dan tabel 5

Hal ini memberikan informasi kepada kita bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks kebebasan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, atau hubungan positif antara kebebasan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan semakin kurang kebebasan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin rendah. Misalnya, dalam kasus negara anggota OKI: Tajikistan memiliki indeks kebebasan perekonomian sebesar 4-yang berarti Tajikistan berada

di dalam kategori negara *repressed* atau tidak bebas dalam perekonomiannya, pertumbuhan pada tahun yang sama adalah sebesar -10,4%. Sementara itu, Oman memiliki indeks kebebasan sebesar 2,8-yang berarti perekonomiannya termasuk dalam kategori Negara lebih bebas (*Mostly Free*), pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun yang sama adalah sebesar 5,9%. Pola ini juga dialami oleh Negara-negara anggota non-OKI.



Sumber: data yang diolah dari tabel 4 dan tabel 5

Namun, ada beberapa kasus khusus dimana indeks kebebasan perekonomian memiliki hubungan positif dengan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonominya atau terdapat hubungan negatif antara kebebasan perekonomian dan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonominya. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor lain-lain selain apa yang telah dibahas dalam indeks kebebasan-perekonomian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Kesimpulan

Dari ilustrasi dan analisis di atas, kita dapat melihat dengan jelas beberapa fakta mengenai dampak kebebasan perekonomian pada PDB per kapita pada tahun 2000. Semakin tinggi indeks kebebasan perekonomian—yang berarti bahwa semakin besar tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian dan

ekonomi kurang menikmati kebebasannya, maka sebuah negara akan memiliki PDB per kapita yang semakin rendah. Sebaliknya, makin rendah indeks kebebasan ekonomi—yang berarti bahwa semakin banyak sektor ekonomi negara tersebut menikmati kebebasan, maka Negara tersebut akan memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi.

Walaupun kedua kelompok negara yang merupakan anggota OKI dan Negara non-anggota OKI memiliki pola yang sama, akan tetapi Negara-Negara yang merupakan anggota OKI memiliki indeks kebebasan ekonomi yang lebih tinggi— yang berarti kebebasan ekonomi yang lebih rendah demikian dengan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonominya—jika dibandingkan dengan Negara- Negara non anggota OKI secara umum.

Sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa hasil yang paling menjadi fokus dalam kajian ini adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebebasan perekonomian, dan dalam kajian ini, temuan kami mendukung hipotesa bahwa terdapat hubungan positif antara kebebasan ekonomi di suatu negara dan pertumbuhan PDB per kapita, yaitu: semakin besar tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian dan ekonomi kurang menikmati kebebasannya di sebuah negara, semakin rendah pertumbuhan PDB per kapita. sebaliknya, ekonomi yang lebih menikmati kebebasan di sebuah negara, akan mengalami pertumbuhan PDB per kapita yang semakin tinggi. Jika kita membandingkan Negara-negara anggota OKI dan Negara-negara non anggota OKI, dalam konteks ini, adalah jelas bahwa Negara anggota OKI kurang memiliki kebebasan dalam perekonomiannya, karena itulah pertumbuhan yang lebih rendah dialami oleh Negara anggota OKI. Sebaliknya, Negara-negara non anggota OKI memiliki kebebasan perekonomian yang lebih tinggi demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya.

Temuan studi ini mendukung teori perdagangan internasional, karena salah satu faktor kebebasan dalam ekonomi adalah kebijakan perdagangan, derajat dimana pemerintah membuka aliran bebas perdagangan asing, dimana dalam perdagangan internasional bahwa jika sebuah negara membuka perdagangan Negara mereka—dalam arti memiliki kebijakan perdagangan yang lebih terbuka—maka Negara tersebut akan lebih makmur dibandingkan dengan kondisi *autarky*. Tentunya temuan dari studi ini hanya bersifat sementara. Bukti lainnya dari

penelitian-penelitian lain juga diperlukan untuk menentukan apakah temuan ini adalah khusus untuk pengalaman saat ini saja. a Penggunaan dari metode, variabel dan data lain perlu dipertimbangkan dalam rangka untuk memperbaiki model yang telah digunakan dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fredrik Carlsson and Susanna Lundstrom. "Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effect." *Public Choice* 112, 3-4; ABI INFORM GLOBAL (2000): 335-344.
- Gerald P. O'Driscoll, Jr., et al. "2003 Index of Economic Freedom." The Heritage Foundation. The Wall Street Journal, Dow Jones & Company, Inc. New York, Washington DC. 2003
- Gerald W. Scully. "Economic Freedom, Government Policy and the Trade-off between Equity and Economic Growth." *Public Choice* 113, (2002): 77-96.
- Jac C Heckelman, Michael D Stroup. "Which economic freedoms contribute to growth?" *Kyklos*. Vol.53, Iss. 4; Bern: 2000.
- Jan-Egbert Sturm, Erik Leertouwer, Jakob de Haan, Jac C Heckelman, Michael D Stroup. "Which economic freedoms contribute to growth? A comment /Reply". *Kyklos*. Vol.55, Iss. 3; Bern: 2002.
- Jan-Egbert Sturm & Jakob De Haan. "How robust is the relationship between economic freedom and economic growth?" *Applied Economics*. London: Jun 10, 2001. Vol.33, Iss. 7.

J. Gwartney and R. Lawson. "*Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report*." VanCover, BC: Fraser Institute. 2001

Ludovic Comeau Jr. "Democracy and growth: A relationship revisited". *Eastern Economic Journal*. Winter 2003. Vol.29, Iss. 1; *Bloomsburg*: 1-21.

Ranking State by Freedom. *The American Enterprise*. Apr/May 2003;14, 3; *ProQuest Social Science Journals*: 57.

The World Bank 2002: World Development Indicators. USA: Development Data Center, The World Bank, 2002.

The World competitiveness yearbook 2001, Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland. IMD International Real World. Real Learning